

PENERAPAN PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (E-TLE)

IMPLEMENTATION OF THE *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (E-TLE) PROGRAM

Dwi Andini*, Tukiman

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Koresponden email: dwi01.andini@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan dalam menunjang aktivitas sehari-hari, sehingga volume kendaraan di jalan raya mengalami peningkatan. Untuk itu, dibutuhkan inovasi untuk menertibkan lalu lintas dengan menerapkan *e-government*. Salah satu instansi kepolisian yang memanfaatkan *e-government* dalam menertibkan lalu lintas adalah Polresta Sidoarjo yang saat ini dilakukan melalui kamera CCTV E-TLE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen sukses penerapan program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah elemen sukses penerapan *e-government* berdasarkan hasil kajian dan riset *Harvard JFK School of Government* yang diantaranya adalah *support*, *capacity*, dan *value*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan program E-TLE di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sukses. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan berupa visi misi, peraturan, dan adanya sosialisasi. Penerapan program E-TLE ini juga memberikan manfaat seperti tertib dan disiplin berkendara di jalan raya, hanya saja dalam penerapannya terdapat kendala sistem dan jaringan yang membuat E-TLE terkadang tidak dapat menangkap bukti pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci: Elemen sukses, *e-government*, E-TLE,

ABSTRACT

The use of motorized vehicles in Indonesia has increased in supporting daily activities, so that the volume of vehicles on the road has increased. For this reason, innovation is needed to regulate the traffic by implementing e-government. One of the police agencies that uses e-government to regulate the traffic is Polresta of Sidoarjo which is currently carried out through E-TLE CCTV cameras. This study aims to analyze the elements successful implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) program in Sidoarjo Regency. This research method used qualitative with a descriptive approach. Meanwhile the Data collection techniques were interviews, observations, and documentation. The theory used in this study is a successful element of e-government application based on the results of studies and research of the Harvard JFK School of Government, including support, capacity, and value. The results showed that the implementation of the E-TLE program in Sidoarjo Regency can be said to be successful. This can be seen from the support in the form of vision and mission, regulations, and socialization. The implementation of the E-TLE program also provides benefits such as orderly and disciplined driving on the highway, it's just that in its application there are system and network constraints that make E-TLE sometimes unable to capture evidence of traffic violations.

Keywords: *Element success, e-government, E-TLE,*

PENDAHULUAN

Lalu lintas memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pembangunan seperti infrastruktur, ekonomi, dan mobilitas sehingga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu upaya dalam mendukung aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan berjalan lancar yaitu menggunakan kendaraan bermotor. Menurut (Latifah, 2020) jenis kendaraan bermotor terbagi menjadi 4 yaitu; 1) mobil penumpang, 2) mobil bus, 3) mobil barang dan 4) sepeda motor. Di Indonesia penggunaan kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Menurut data (Bps. Go.Id, 2021) jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan setiap tahun-

nya yaitu tahun 2018 berjumlah 126.508.776 unit, tahun 2019 mencapai 133.617.012 unit, dan kemudian tahun 2020 sebanyak 136.137.45. Penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat di kehidupan masyarakat sebagai alat transportasi. Oleh karena itu menyebabkan semakin meningkat pula jumlah kasus yang melanggar tata tertib lalu lintas di jalan raya (Putri, 2022).

Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan yang dapat menimbulkan sanksi ataupun membahayakan bagi pengguna jalan lain. Menurut Latifah (2020) pelanggaran lalu lintas adalah keadaan dimana terjadinya ketidakselarasan antara adanya aturan yang berlaku dengan pelaksanaan. Faktor yang

menyebabkan masalah lalu lintas adalah jumlah kendaraan, pengguna jalan, kondisi rambu lalu lintas dan kondisi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Para pelanggar lalu lintas di jalan raya tidak dapat dibiarkan begitu saja karena kecelakaan menjadi salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri) dalam dataindonesia.id tahun 2021 berdasarkan wilayahnya, pelanggaran lalu lintas tertinggi di Jakarta 419.061 kasus, kedua Jawa Timur 372.692, dan ketiga Jawa Barat 284.456.

Untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat dibutuhkan penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 272, menyebutkan bahwa untuk mendukung aktivitas penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan digunakan peralatan elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pasal 23 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor pada Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dasarkan pada hasil: temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Kapolri Jendral Listya Sigit Prabowo pada tanggal 23 Maret 2021 mengeluarkan program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) secara nasional di seluruh Indonesia. E-TLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban (Saputra, 2021). Sedangkan menurut (Gazali, 2022) E-TLE didefinisikan sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang efektif dengan menggunakan teknologi elektronik berupa *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yang dapat mendeteksi tandan nomor kendaraan secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan. Dengan adanya penerapan program E-TLE tersebut dapat membantu meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran para pengguna jalan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan pusat industri, perdagangan, dan tentunya juga sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai salah satu kabupaten penyanggah Ibukota Provinsi Jawa Timur dan termasuk Kawasan Gerbang Kertassusila, tidak lepas dari permasalahan pada bidang kemacetan

dan pelanggaran lalu lintas. Banyaknya kendaraan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Untuk itu, kepolisian sebagai penyidik memiliki peran dalam menindak pelanggaran lalu lintas di jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menindak pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo melalui Satlantas Polresta Sidoarjo menerapkan Program E-TLE mulai bulan Februari 2022. Sementara baru diterapkan 6 kamera E-TLE yang terpasang di tiga titik lokasi yang berbeda yaitu; *traffic light* Alun-alun, Babalayar, dan Celep. penempatan kamera E-TLE di perempatan tiga titik lokasi dikarenakan lokasi tersebut titik rawan kemacetan dan pelanggaran lalu lintas di pusat kota Kabupaten Sidoarjo.

Selama penerapan E-TLE di Kabupaten Sidoarjo mulai Februari-Agustus 2022 telah ditemukan beberapa pelanggaran yang ditangkap kamera E-TLE. Pelanggaran lalu lintas oleh kamera E-TLE di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 meningkat. Pada bulan Juni 2.043 dan bulan Agustus mencapai 3.076, sehingga total pelanggaran lalu lintas mulai Februari- Agustus 2022 mencapai 7.728. Kamera memiliki keakuratan yang dapat menindak setiap pelanggaran lalu lintas di jalan. Dengan adanya penerapan E-TLE di Kabupaten Sidoarjo mampu menindak pelanggaran lalu lintas yang tidak terpantau petugas kepolisian di jalan raya.

Penerapan *E-Government* dalam rangka melaksanakan *good governance* merupakan salah satu bentuk yang harus diwujudkan untuk meningkatkan transparansi dalam melakukan penindakan penilangan lalu lintas melalui kamera E-TLE sehingga bersifat efektif. Sehingga penerapan *e-governemnt* sebagai langkah yang baik untuk diterapkan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Menurut (Cantika & RFS, 2021) *E-Government* atau pemerintahan elektronik merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Kabupaten Sidoarjo, dianalisis menggunakan indikator elemen sukses penerapan *e-government* hasil kajian dan riset *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2016) yang diantaranya yaitu, *support*, *capacity*, dan *value*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini kualitatif deskriptif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini akan memuat penjelasan deskriptif secara rinci sesuai dengan data dan fakta

yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Elemen Sukses Penerapan Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, analisis menggunakan indikator elemen sukses penerapan *e-government* hasil kajian dan riset *Harvard JFK School of Governemnt* (Indrajit, 2016) yang diantaranya yaitu, *support*, *capacity*, dan *value*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teknik penarikan informan berupa purposive sampling dan snowball sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang didapatkan melalui tahap wawancara dan dokumentasi di lapangan, selanjutnya dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya tentang penindakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo yang dianalisis menggunakan indikator elemen sukses penerapan *e-government* hasil kajian dan riset *Harvard JFK School of Governemnt* (Indrajit, 2016).

Support

Elemen *support* merupakan elemen pertama yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk suksesnya penerapan E-TLE. Tanpa adanya keinginan dari pemerintah untuk benar-benar menerapkan konsep *e-government*, E-TLE tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak pemerintahan, dapat mensukseskan penerapan E-TLE. Terdapat beberapa poin penting dalam elemen *support* yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Adanya visi dan misi

Dengan adanya visi dan misi ini memberikan dukungan untuk mensukseskan penerapan E-TLE sebagai sarana untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat diketahui tentang visi dan misi penerapan program E-TLE di Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan kepatuhan dan ketertiban dalam berkendara di jalan raya serta meminimalisir laka lantas. Dengan adanya E-TLE dapat menindak pelanggar lalu lintas selama 24 jam nonstop di tempat yang terpasang kamera CCTV E-TLE serta terdapat bukti capture atau foto pelanggar lalu lintas yang dijadikan

sebagai bukti. Tentunya hal ini membantu polisi dalam menindak pelanggaran lalu lintas tanpa turun langsung ke jalan.

b. Adanya suprastruktur pendukung (seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah)

Adanya regulasi yang jelas dalam penerapan program E-TLE sebagai pendukung terhadap sistem kerja di Polresta Sidoarjo. Peraturan yang ada akan menjadi pedoman atau acuan dalam penerapan program E-TLE. Penerapan program E-TLE di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya pedoman atau acuan dalam penerapan program E-TLE telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 272 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pasal 23 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor pada jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil: temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan; dan / atau rekaman peralatan elektronik. Dalam hal ini peralatan elektronik yang dimaksud adalah perekam kejadian untuk menyimpan informasi yang bisa dikatakan ialah kamera CCTV E-TLE. Dari regulasi yang telah ada ini dapat mendukung penerapan program E-TLE dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

c. Adanya sosialisasi

Dengan adanya sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah yang terlibat dan kepada masyarakat dapat menjadi pendukung dalam penerapan *e-government* ini. Melalui sosialisasi memberikan manfaat bagi Polresta Sidoarjo selaku penyelenggara E-TLE dan tentunya memberikan wawasan bagi masyarakat, bahwasannya saat ini penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui kamera CCTV E-TLE. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa sosialisasi penerapan program E-TLE yang dilakukan Polresta Sidoarjo melalui Satlantas Polresta Sidoarjo dengan media elektronik yaitu sosial media Instagram Satlantas Polresta Sidoarjo dengan menshare tentang mekanisme penerapan E-TLE, titik lokasi diberlakukannya E-TLE dan sistem pembayaran denda. Dan dilakukan secara offline dengan turun langsung ke sekolah dan jalan. Selain itu, sosialisasi dilakukan dengan uji coba selama 2 bulan sebelum E-TLE diterapkan tetapi belum dilakukan penindakan namun kearah peringatan. Sosialisasi terkait E-TLE juga dilakukan de-

ngan memasang rambu yang bertulisan E- TLE di traffic light yang terpasang kamera CCTV E-TLE.



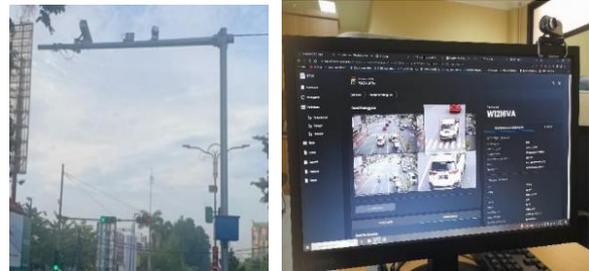
Gambar 1. Bentuk Sosialisasi E-TLE di Kabupaten Sidoarjo

Capacity

Elemen capacity adalah bentuk kemampuan yang dimiliki. Adanya kemampuan dalam menjalankan pemerintahan digital juga harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai (Indrajit, 2016). Terdapat tiga hal yang harus dimiliki oleh pemerintah pada elemen ini, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya finansial
 Sumber daya finansial menjadi sumber daya pertama dalam mensukseskan penerapan E-TLE. Sumber daya finansial dapat mempengaruhi proses penerapan E-TLE, sebab faktor finansial menentukan terpenuhinya sumber daya lainnya dalam penerapan *e-government* ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya finansial dalam penerapan program E-TLE di Kabupaten Sidoarjo berasal dari alokasi dana APBD untuk pengadaan kamera dengan spesifik khusus untuk penerapan E-TLE di titik lokasi yang telah ditetapkan.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi
 Infrastruktur merupakan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk suatu kepentingan dalam penerapan E-TLE sangat membantu untuk mensukseskan penerapan *e-government* tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa infrastruktur yang digunakan untuk menunjang kesuksesan penerapan prog-

ram E-TLE di Kabupaten Sidoarjo seperti kamera, pc, dan printer. Sistem E-TLE mengalami kendala bila terdapat plat nomer kendaraan palsu dan kendaraan yang tidak menggunakan plat nomer. Serta bilamana E-TLE mengalami gangguan jaringan, kamera CCTV E-TLE tidak dapat menindak pelanggaran lalu lintas tersebut.



Gambar 2. Infrastruktur Pendukung E-TLE

c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor suksesnya penerapan E-TLE. Dalam hal ini sumber daya manusia berperan penting untuk menjalankan atau mengoperasikan E-TLE. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sumber daya manusia yang menunjang kesuksesan penerapan program E-TLE, dengan cara memberdayakan sumber daya manusia yang ada dan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia diadakan pelatihan dan bimbingan. Sumber daya manusia berasal dari petugas kepolisian sektor lintas bagian tilang sesuai dengan hak akses yang diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas tugas serta tanggungjawab masing-masing dan memudahkan koordinasi antar bagian.

Value

Manfaat menjadi salah satu elemen sukses penerapan *e-government*. Besarnya manfaat yang diperoleh dari adanya *e-government* tidak hanya ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, tetapi juga masyarakat selaku pengguna sekaligus penerima layanan public yang diberikan oleh pemerintah (Indrajit, 2016). Penerapan *e-government* dirasa kurang apabila tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya penerapan *e-government*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa manfaat yang dirasakan Polresta Sidoarjo selaku penyelenggara program E-TLE diantaranya dapat menindak pelanggaran lalu lintas selama 24 jam nonstop, dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan selama tata muka dan terdapat capture pelanggaran yang dapat dijadikan alat bukti

pelanggaran yang dapat dijadikan alat bukti dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, bagi masyarakat yang melakukan konfirmasi pelanggaran ke Polresta Sidoarjo menjelaskan bahwa adanya penerapan program E-TLE dapat membantu berdisiplin dan tertib dalam berkendara di jalan raya. E-TLE juga dapat menekan angka kecelakaan yang diawali dengan pelanggaran serta terdapat capture yang dapat mengetahui jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelanggar.

KESIMPULAN

Elemen sukses penerapan program *electronic traffic light enforcement* (E-TLE) di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sukses. Hal ini dapat dilihat dari adanya *support* atau dukungan dari pemerintah berupa visi dan misi untuk mensukseskan penerapan E-TLE, adanya dukungan berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan E-TLE, serta adanya sosialisasi. Pada elemen *capacity* menunjukkan bahwa sumber daya finansial berasal dari alokasi dana APBD, tersedianya infrastruktur penunjang dan selanjutnya untuk sumber daya manusia yang cukup pada penerapan E-TLE dengan memaksimalkan sumber daya yang ada secara optimal. Pada elemen *value* menunjukkan Polresta Sidoarjo merasakan manfaat dari diterapkannya E-TLE seperti dapat menindak pelanggaran lalu lintas selama 24 jam nonstop dan terdapat capture pelanggaran yang dapat dijadikan alat bukti dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu untuk berdisiplin dan tertib dalam berkendara di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3242>
- Anggaraini, N. (2023). *Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Sumut* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Armala, Y., & Yasir, M. (2022). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. *Hukum*, 5(1), 32–44. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTIFIABLE/article/view/405>
- Bps.Go.Id. (2020). *Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2020*.
- Diva, C., & RFS, H. T. (2021). Elemen Sukses Pelayanan E-Government dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(1), 49–60. <https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3228>
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep Dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. https://www.academia.edu/30156351/Electronic_Government_in_Action
- Laili, N. S., & Kriswibowo, A. (2022). Elemen Sukses Penerapan Sistem Informasi Kependudukan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 295–301. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8031>
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publichuo*, 4(1), 19.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lestari, I. D., Wardani, D., & Wibawani, S. (2020). Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 2(2).
- Pardede, C. R. V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2022). Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 533-542.
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor pada Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2012).
- Putri, S. A. (2022). *Pelaksanaan Sosialisasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Tertib Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru*. 5(2), 1349–1356. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1302>
- Salsabila, A. T., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 593-610.

- Syafitri, E. (2022). Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 5(2), 1322–1337. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1300>
- Wahyu, A. K., & Tukiman. (2022). Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, 8(September), 339–346. <http://www.jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/126>
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. (2022). Institutional Synergy In Sustainable Peatland Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 420-424.